

PENGARUH KAPASITAS SDM, PEMANFAATAN TI, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Yudi Rahman¹, Fakhri^{2*}, Fauzianor³, Novi Indriyanti⁴

^{1,2,3,4}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia Banjarmasin, Indonesia

e-mail: fakhrizidane@gmail.com

Abstract: *This study aims to examine the effects of human resource (HR) capacity, information technology (IT) utilization, and the Government Internal Control System (GICS) on the quality of financial statements of the Hulu Sungai Utara Regency Government, both simultaneously, partially, and dominantly. The study employed a quantitative approach with descriptive and explanatory research designs. The population consisted of 78 financial officers from 39 Regional Government Work Units (SKPD), selected using a census technique. Data were collected through questionnaires and analyzed using multiple linear regression with SPSS. The results indicate that HR capacity, IT utilization, and GICS simultaneously have a significant effect on the quality of government financial statements. Partially, all three variables also have positive and significant effects, with GICS exerting the strongest influence. The coefficient of determination shows that the model explains 58% of the variation in financial statement quality, while the remaining 42% is influenced by other factors outside the model. These findings suggest that improving the quality of local government financial statements requires strengthening HR capacity, optimizing IT utilization, and ensuring the effective and sustainable implementation of the Government Internal Control System.*

Keywords: *human resource capacity; information technology; Government Internal Control System; financial statement quality; local government.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kapasitas sumber daya manusia (SDM), pemanfaatan teknologi informasi (TI), dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, baik secara simultan, parsial, maupun dominan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan explanatory. Populasi penelitian terdiri atas 78 pegawai bagian keuangan pada 39 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditentukan menggunakan teknik sensus. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas SDM, pemanfaatan TI, dan SPIP secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Secara parsial, ketiga variabel juga berpengaruh positif dan signifikan, dengan SPIP sebagai variabel yang memberikan pengaruh paling dominan. Koefisien determinasi menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan 58% variasi kualitas laporan keuangan, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah memerlukan penguatan kapasitas SDM, optimalisasi pemanfaatan TI, dan implementasi SPIP yang efektif serta berkelanjutan.

Kata Kunci: sumber daya manusia; teknologi informasi; sistem pengendalian intern pemerintah; kualitas laporan keuangan; pemerintah daerah

Pendahuluan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah cara pemerintah daerah melaporkan pengelolaan keuangan mereka selama satu tahun anggaran. LKPD memberikan informasi tentang kondisi keuangan, kinerja, dan arus kas yang berguna bagi orang-orang yang berkepentingan dalam membuat keputusan ekonomi (Bastian, 2006; 2010).

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, LKPD harus disampaikan kepada DPRD setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. LKPD disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Kualitas LKPD sangat penting karena menunjukkan seberapa transparan dan akuntabel pengelolaan keuangan daerah. Salah satu tolak ukur kualitas LKPD adalah opini audit BPK, mulai dari Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hingga Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Semakin baik opini yang diperoleh, semakin tinggi tingkat kewajaran dan keandalan laporan keuangan yang disajikan.

Kualitas LKPD dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang memadai sangat diperlukan dalam memahami dan menerapkan standar akuntansi. SDM yang kompeten dapat membantu menghindari kesalahan pencatatan dan pelaporan. Namun, hasil penelitian terdahulu menunjukkan ketidakkonsistenan tentang pengaruh kapasitas SDM terhadap kualitas pelaporan keuangan. di mana Setyaningrum (2016) menemukan bahwa kapasitas SDM berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan, sedangkan Yanti (2013) menemukan sebaliknya.

Kedua, pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan kecepatan, akurasi, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah telah mendorong penggunaan sistem informasi keuangan berbasis teknologi melalui berbagai regulasi. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan perbedaan temuan tentang pengaruh teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan di mana Roshanti dkk. (2021) menyatakan adanya pengaruh positif, sementara Harmoni (2016) menemukan tidak adanya pengaruh signifikan.

Table 1: Rekap Opini LKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018–2025

No	Tahun	Opini BPK	Keterangan
1	2018	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	Sesuai SAP
2	2019	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	Konsisten
3	2020	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	Konsisten
4	2021	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	Konsisten
5	2022	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	Konsisten
6	2023	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	Konsisten
7	2024	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	Konsisten
8	2025	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	Konsisten

Sumber: Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (2026)

Ketiga, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bertujuan memastikan tercapainya efektivitas, efisiensi, keandalan pelaporan, serta kepatuhan terhadap peraturan. SPIP sangat penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Namun, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala Penelitian Ridzal dkk. (2022) dan Andrian dkk. (2017)

menunjukkan bahwa SPIP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara telah menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan memperoleh opini WTP selama delapan tahun berturut-turut, dari tahun 2018 hingga 2025. Namun, ada beberapa masalah yang masih perlu diperhatikan, seperti keterlambatan dalam memvalidasi data aset dan piutang, serta kurangnya rincian dan keterbatasan dalam pengungkapan Catatan atas Laporan Keuangan. Selain itu, masih terdapat temuan berulang tentang kesalahan penganggaran.

Dari sisi sumber daya manusia, masih ada keterbatasan kompetensi yang terlihat dari komposisi pendidikan pengelola keuangan yang banyak didominasi lulusan non-akuntansi dan kurangnya pelatihan teknis. Di sisi teknologi, meskipun Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara telah menggunakan aplikasi seperti SIPD dan Simda-NG, pemanfaatannya belum optimal. Implementasi SPIP juga belum sepenuhnya efektif, karena tingkat maturitas masih berada pada level 3, atau terdefinisi, dan belum merata di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan antara capaian opini WTP dengan kualitas substansi laporan keuangan yang masih menghadapi berbagai kendala teknis dan sistemik. Selain itu, perbedaan hasil penelitian sebelumnya tentang pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan SPIP terhadap kualitas laporan keuangan menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pengaruh simultan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah; (2) menganalisis pengaruh parsial kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah; dan (3) mengidentifikasi variabel yang paling dominan mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan merupakan proses perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien (Fahmi, 2013). Fungsi utama manajemen keuangan meliputi keputusan investasi, pendanaan, dan pengelolaan aset. Dalam konteks sektor publik, manajemen keuangan berperan dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi melalui penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar.

Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban yang menyajikan informasi posisi keuangan, kinerja, dan arus kas untuk pengambilan keputusan. Laporan yang berkualitas harus memenuhi prinsip relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Kapasitas Sumber Daya Manusia

Kapasitas sumber daya manusia (SDM) adalah kemampuan individu atau organisasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman guna mencapai kinerja optimal (Tjiptoherijanto, 2001; Griffin, 2004). SDM yang kompeten akan

meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan. Menurut Griffin (2004) indikator kapasitas SDM adalah pendidikan (pemahaman tugas dan fungsi akuntansi), pelatihan (kesesuaian dengan kebutuhan pekerjaan), dan pengalaman (lama kerja dan kemampuan teknis).

Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI)

Teknologi informasi adalah seperangkat alat yang digunakan untuk mengolah, menyimpan, dan menyampaikan informasi guna meningkatkan efisiensi kerja (Kadir & Triwahyuni, 2012). Pemanfaatannya dalam sektor publik berperan dalam meningkatkan akurasi, kecepatan, dan transparansi pelaporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik serta pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses dengan mudah (Turban et al, 2005). Indikator pemanfaatan teknologi informasi (Turban et al., 2005) yaitu perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), basis data (*database*), dan jaringan komunikasi.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

SPIP adalah proses yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi, keandalan laporan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan (PP No. 60 Tahun 2008). SPIP berperan penting dalam meminimalkan kesalahan dan meningkatkan kualitas pelaporan. indikator SPIP (PP No. 60 Tahun 2008), yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan tingkat kemampuan laporan dalam menyajikan informasi yang berguna, akurat, dan dapat dipercaya sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No. 71 Tahun 2010). Laporan keuangan yang berkualitas mencerminkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Indikator kualitas LKPD (PP No. 71 Tahun 2010) yaitu relevan (bermanfaat untuk pengambilan keputusan), andal (bebas kesalahan material dan dapat diverifikasi), dapat dibandingkan (konsisten antar periode/entitas), dan dapat dipahami (mudah dimengerti pengguna)

Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Faktor-faktor ini termasuk kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah.

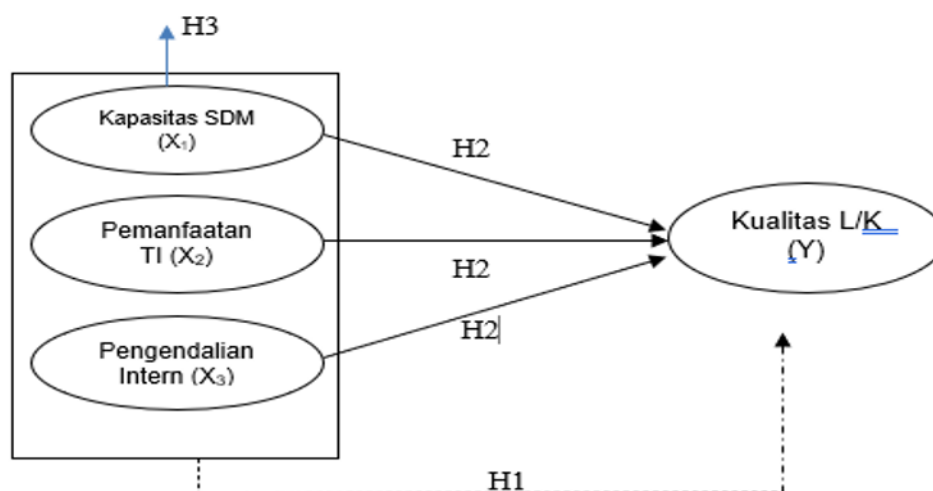
Banyak penelitian menunjukkan bahwa ketiga faktor ini memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Setianingrum (2016), Roshanti et al. (2014), Andrian dan Rahmawati (2017), Ridzal et al. (2022), Yosefrinaldi (2013), Soimah (2014), Riandani (2017), serta Julita dan Susilatri (2018) menemukan bahwa kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Namun, beberapa hasil penelitian tidak konsisten. Harmoni (2016) menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan Yuliani dan Agustini (2016) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan pengendalian intern tidak berpengaruh signifikan. Nurlis (2018) juga menemukan bahwa penerapan standar akuntansi tidak berpengaruh, tetapi kompetensi aparatur tetap berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian lain seperti Nilam Sari (2016) dan Rahmadani (2015) menunjukkan bahwa selain kapasitas sumber daya manusia, faktor lain seperti pemahaman akuntansi dan sistem akuntansi juga mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Sementara itu, Mardiana dan Fahlevi (2017) menegaskan bahwa pengendalian internal dan penerapan SAP berbasis akrual memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun, perbedaan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh masing-masing faktor masih perlu diuji kembali pada konteks dan lokasi yang berbeda, termasuk pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian



Gambar 1. Kerangka Konseptual
Sumber: Berbagai Sumber (2026)

Adapun hipotesis dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu;

H1: Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

H2: Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

H3: Kapasitas Sumber Daya Manusia adalah variabel yang berpengaruh dominan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Metode

Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan explanatory. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menguji hipotesis melalui analisis statistik, sedangkan *explanatory research* bertujuan menjelaskan hubungan antar variabel, yaitu kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan mempertimbangkan ketersediaan data serta relevansi isu penelitian.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen yaitu kapasitas sumber daya manusia (X1), pemanfaatan teknologi informasi (X2), dan sistem pengendalian intern pemerintah (X3), serta variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan (Y). Kapasitas SDM (X1), diukur melalui indikator pendidikan (X_{1.1}), pelatihan (X_{1.2}), pengalaman (X_{1.3}), dan tanggung jawab (X_{1.4}). Pemanfaatan teknologi informasi (X2), diukur melalui penggunaan perangkat keras (X_{2.1}), perangkat lunak (X_{2.2}), basis data (X_{2.3}), dan jaringan komunikasi (X_{2.4}).

Sistem pengendalian intern (X3) diukur berdasarkan lingkungan pengendalian (X_{3.1}), penilaian risiko (X_{3.2}), kegiatan pengendalian (X_{3.3}), informasi dan komunikasi (X_{3.4}), serta pemantauan (X_{3.5}). Sementara itu, kualitas laporan keuangan diukur melalui karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Seluruh variabel diukur menggunakan skala Likert dengan lima tingkat penilaian, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif berupa gambaran umum organisasi, sedangkan data kuantitatif berupa hasil kuesioner. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada pegawai bagian keuangan SKPD, serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen dan literatur terkait.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada bagian keuangan di 39 SKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berjumlah 78 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria pegawai yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan. Karena jumlah populasi relatif kecil, seluruh populasi dijadikan sampel (sensus).

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner. Kuesioner digunakan sebagai instrumen utama untuk memperoleh data primer dari responden terkait variabel penelitian.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan bantuan program SPSS. Tahapan analisis meliputi uji instrumen (validitas dan reliabilitas), uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan linearitas), serta pengujian hipotesis menggunakan regresi linier berganda.

Model regresi yang digunakan adalah:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji F untuk mengetahui pengaruh simultan, uji t untuk mengetahui pengaruh parsial, serta analisis koefisien beta untuk menentukan variabel dominan. Selain itu, koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

Hasil dan Diskusi

Hasil

Uji Validitas

Tabel 2: Rekap Opini LKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018–2025

Variabel	Item	R hitung	R syarat	Keterangan
X1	P1	0,497	0,30	Valid
X1	P2	0,608	0,30	Valid
X1	P3	0,417	0,30	Valid
X1	P4	0,651	0,30	Valid
X1	P5	0,544	0,30	Valid
X1	P6	0,516	0,30	Valid
X1	P7	0,679	0,30	Valid
X1	P8	0,651	0,30	Valid
X2	P1	0,430	0,30	Valid
X2	P2	0,516	0,30	Valid
X2	P3	0,803	0,30	Valid
X2	P4	0,809	0,30	Valid
X2	P5	0,612	0,30	Valid
X2	P6	0,516	0,30	Valid
X2	P7	0,803	0,30	Valid
X2	P8	0,809	0,30	Valid
X3	P1	0,707	0,30	Valid
X3	P2	0,718	0,30	Valid
X3	P3	0,779	0,30	Valid
X3	P4	0,785	0,30	Valid
X3	P5	0,404	0,30	Valid
X3	P6	0,553	0,30	Valid
X3	P7	0,354	0,30	Valid
X3	P8	0,327	0,30	Valid
X3	P9	0,322	0,30	Valid
X3	P10	0,302	0,30	Valid
Y	P1	0,458	0,30	Valid

Variabel	Item	R hitung	R syarat	Keterangan
Y	P2	0,484	0,30	Valid
Y	P3	0,690	0,30	Valid
Y	P4	0,702	0,30	Valid
Y	P5	0,786	0,30	Valid
Y	P6	0,690	0,30	Valid
Y	P7	0,702	0,30	Valid
Y	P8	0,786	0,30	Valid

Sumber: Diolah Penulis (2026)

Berdasarkan hasil uji validitas, seluruh item pernyataan pada variabel X1, X2, X3, dan Y memiliki nilai korelasi (r hitung) lebih besar dari r tabel (0,30). Hal ini menunjukkan bahwa seluruh instrumen penelitian dinyatakan valid dan mampu mengukur konstruk yang diteliti secara tepat. Dengan demikian, kuesioner yang digunakan layak untuk dianalisis lebih lanjut pada tahap pengujian berikutnya.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui konsistensi instrumen penelitian. Instrumen dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai Cronbach's Alpha $> 0,60$ (Arikunto dalam Supriyanto dan Machfudz, 2010).

Tabel 3: Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kapasitas SDM (X1)	0,703	Reliabel
Pemanfaatan TI (X2)	0,830	Reliabel
Sistem Pengendalian Intern (X3)	0,685	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	0,825	Reliabel

Sumber: Diolah Penulis (2026)

Berdasarkan Tabel 3, seluruh variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,60. Dengan demikian, seluruh instrumen penelitian dinyatakan reliabel dan dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan menggunakan grafik Normal P-P Plot. Hasil menunjukkan bahwa titik-titik data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa data berdistribusi normal, sehingga model regresi memenuhi asumsi normalitas dan layak digunakan.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik scatterplot antara nilai prediksi (ZPRED) dan residual (SRESID). Hasil menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak di atas dan di bawah sumbu nol tanpa membentuk pola tertentu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga model regresi memenuhi asumsi homoskedastisitas.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai $VIF < 5$ dan nilai Tolerance mendekati 1, sehingga tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi.

Tabel 4: Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF	Tolerance	Keterangan
Kapasitas SDM (X1)	1,035	0,966	Tidak terjadi multikolinieritas
Pemanfaatan TI (X2)	1,264	0,791	Tidak terjadi multikolinieritas
Sistem Pengendalian Intern (X3)	1,225	0,816	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: Diolah Penulis (2026)

Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 11,569 + 0,181X_1 + 0,227X_2 + 0,575X_3$$

Tabel 5. Hasil Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien (B)	t hitung	t tabel	Beta	Sig
Konstanta	11,569	-	-	-	-
Kapasitas SDM (X1)	0,181	3,038	1,665	0,233	0,003
Pemanfaatan TI (X2)	0,227	3,160	1,665	0,268	0,002
Sistem Pengendalian Intern (X3)	0,575	9,495	1,665	0,791	0,000

Sumber: Diolah Penulis (2026)

Nilai konstanta sebesar 11,569 menunjukkan bahwa ketika seluruh variabel independen berada dalam kondisi konstan, maka kualitas laporan keuangan tetap berada pada tingkat tertentu. Namun, dalam konteks skala Likert, konstanta lebih berfungsi sebagai nilai dasar model.

Koefisien regresi X1 sebesar 0,181 mengandung arti bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia akan meningkatkan kualitas laporan keuangan, dengan asumsi variabel lain tetap. Hal ini menegaskan pentingnya kompetensi, pengalaman, dan pelatihan dalam mendukung penyusunan laporan keuangan yang baik.

Koefisien X2 sebesar 0,227 menunjukkan bahwa semakin optimal pemanfaatan teknologi informasi, maka kualitas laporan keuangan juga meningkat. Ini mengindikasikan bahwa penggunaan sistem informasi yang efektif mampu meningkatkan akurasi dan ketepatan pelaporan.

Koefisien X3 sebesar 0,575 merupakan yang terbesar, yang berarti sistem pengendalian intern memiliki pengaruh paling kuat terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pengendalian, pengawasan, dan prosedur internal yang baik sangat menentukan keandalan laporan keuangan.

Koefisien Determinasi

Berdasarkan Tabel 6, sebesar 58% variasi kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan oleh X1, X2, dan X3, sedangkan 42% dipengaruhi faktor lain di luar penelitian.

Tabel 6: Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square
0,762	0,580	0,563

Sumber: Diolah Penulis (2026)

Uji Hipotesis**Tabel 7: Uji Parsial (Uji t)**

Variabel	t hitung	Sig.	Beta	Keterangan
Kapasitas SDM (X1)	3,038	0,003	0,233	Signifikan
Pemanfaatan TI (X2)	3,160	0,002	0,268	Signifikan
Sistem Pengendalian Intern (X3)	9,495	0,000	0,791	Signifikan (Dominan)

Sumber: Diolah Penulis (2026)

Tabel 8: Uji Simultan (Uji F)

Uji Simultan	F hitung	F tabel	Sig	Keterangan
Model	34,117	2,7283	0,000	Signifikan

Sumber: Diolah Penulis (2026)

Tabel 7 menunjukkan nilai F hitung sebesar 34,117 lebih besar dari F tabel 2,7283, dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti bahwa secara bersama-sama variabel Kapasitas SDM (X1), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2), dan Sistem Pengendalian Intern (X3) berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y). Dengan demikian, model penelitian yang digunakan dinyatakan layak dan mampu menjelaskan hubungan antar variabel secara keseluruhan.

Selanjutnya, berdasarkan Tabel 8, seluruh variabel independen memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, yaitu X1 sebesar 0,003, X2 sebesar 0,002, dan X3 sebesar 0,000. Selain itu, nilai t hitung masing-masing variabel juga lebih besar dari t tabel (1,665). Hal ini menunjukkan bahwa secara individu Kapasitas SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern masing-masing berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Artinya, peningkatan pada masing-masing variabel tersebut akan berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan.

Sementara itu, berdasarkan uji dominan, variabel Sistem Pengendalian Intern (X3) memiliki nilai Beta terbesar yaitu 0,791 dibandingkan variabel lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern merupakan faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan. Dengan kata lain, semakin baik sistem pengendalian intern yang diterapkan, maka akan semakin tinggi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Pembahasan**Pengaruh Kapasitas SDM, Pemanfaatan TI, dan SPIP Secara Simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI), dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini dibuktikan dengan nilai Fhitung (34,117) > Ftabel (2,7283) dan signifikansi $0,000 < 0,05$. Temuan ini mengindikasikan

bahwa peningkatan kualitas laporan keuangan tidak dapat dipisahkan dari sinergi ketiga faktor tersebut.

Secara teoritis, kualitas laporan keuangan menurut PP No. 71 Tahun 2010 ditentukan oleh karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Ketiga variabel independen dalam penelitian ini merupakan faktor fundamental yang mendukung tercapainya karakteristik tersebut. Kapasitas SDM memastikan kompetensi penyusun laporan, TI mempercepat dan meningkatkan akurasi proses, sedangkan SPIP menjamin keandalan dan kepatuhan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan yang ditemukan oleh Desy Setianingrum pada tahun 2016 dan Arina Roshanti dan tim pada tahun 2014. Mereka menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia, penggunaan teknologi informasi, dan pengendalian internal secara bersama-sama memiliki pengaruh besar terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Di Kabupaten Hulu Sungai Utara, meskipun kualitas laporan keuangan sudah cukup baik, masih ada beberapa masalah. Contohnya, masih ada tantangan dalam menyajikan laporan secara konsisten dan tepat waktu. Sebagian besar responden setuju bahwa penerapan ketiga variabel sudah berjalan, tetapi masih perlu ditingkatkan.

Oleh karena itu, untuk mencapai kualitas laporan keuangan yang baik, ketiga faktor tersebut harus berjalan dengan baik dan terintegrasi. Meskipun saat ini kondisinya sudah cukup baik, tetapi masih diperlukan perbaikan dan penyempurnaan terus-menerus. Terutama, perlu ditingkatkan konsistensi dan ketepatan waktu pelaporan, agar kualitas laporan keuangan semakin baik.

2. Pengaruh Secara Parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Secara parsial, seluruh variabel menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

a. Kapasitas SDM (X1)

Kapasitas SDM berpengaruh positif signifikan dengan koefisien 0,181 dan signifikansi 0,003 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi, pendidikan, pelatihan, dan pengalaman pegawai, maka kualitas laporan keuangan akan semakin baik.

Secara teori, Griffin (2004) menyatakan bahwa SDM merupakan elemen kunci dalam pencapaian tujuan organisasi. Dalam konteks akuntansi sektor publik, SDM yang kompeten mampu menghasilkan laporan yang andal dan relevan. Temuan ini didukung oleh penelitian Nilam Sari (2016) dan Elvin Andrian & Rahmawati (2017). Berdasarkan rekap responden, indikator pelatihan dan pengalaman mendapat nilai tinggi, sementara latar belakang pendidikan akuntansi relatif lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi lebih banyak diperoleh melalui pengalaman kerja.

Temuan ini menunjukkan bahwa kompetensi praktis (pelatihan dan pengalaman) menjadi faktor utama dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan, bahkan ketika latar belakang pendidikan akuntansi belum sepenuhnya memadai. Dengan kata lain, peningkatan kualitas

laporan keuangan dapat dicapai melalui penguatan kapasitas SDM secara berkelanjutan, khususnya melalui pelatihan teknis dan pengalaman kerja, agar laporan yang dihasilkan lebih andal, relevan, dan sesuai standar.

Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)

Pemanfaatan TI berpengaruh positif signifikan dengan koefisien 0,227 dan signifikansi $0,002 < 0,05$. Artinya, penggunaan sistem informasi dan teknologi yang baik mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan, terutama dalam hal ketepatan waktu dan akurasi data.

Menurut Turban et al. (2005), TI berperan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengolahan informasi. Hasil ini sejalan dengan penelitian Nining Asniar (2022) dan Yosefrinaldi (2013). Berdasarkan data responden, pemanfaatan TI di SKPD tergolong tinggi, ditandai dengan penggunaan sistem komputerisasi dan jaringan dalam proses pelaporan. Fenomena ini menunjukkan bahwa digitalisasi telah mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan.

Temuan ini menunjukkan bahwa digitalisasi menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan, karena mampu mempercepat proses pengolahan data dan meminimalkan kesalahan. Tingginya pemanfaatan TI di SKPD mengindikasikan bahwa sistem yang sudah berjalan perlu terus dioptimalkan dan dipelihara, sehingga manfaatnya dapat maksimal dalam menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dan tepat waktu.

Sistem Pengendalian Intern (X3)

SPIP berpengaruh positif signifikan dengan koefisien terbesar yaitu 0,575 dan signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sistem pengendalian intern, maka kualitas laporan keuangan semakin meningkat.

Secara teori, SPIP (PP No. 60 Tahun 2008) bertujuan menjamin keandalan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan. Mahmudi (2007) menegaskan bahwa pengendalian intern yang baik mampu meminimalkan kesalahan dan kecurangan. Hasil ini didukung oleh penelitian Soimah (2014) dan Rahmadani (2015). Berdasarkan rekap responden, seluruh indikator SPIP (lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, komunikasi, dan pemantauan) memperoleh jawaban “setuju”, yang menunjukkan implementasi SPIP sudah berjalan baik di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Temuan ini menunjukkan bahwa SPIP merupakan faktor kunci (dominan) dalam menjamin kualitas laporan keuangan, karena mampu memastikan keandalan, kepatuhan, serta meminimalkan kesalahan dan kecurangan. Implementasi SPIP yang sudah baik di Kabupaten Hulu Sungai Utara perlu dipertahankan dan terus diperkuat, karena menjadi fondasi utama dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, terpercaya, dan akuntabel.

Variabel Dominan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel yang paling dominan adalah Sistem Pengendalian Intern (X3), dengan nilai Beta terbesar yaitu 0,791. Hal ini berarti SPIP memiliki pengaruh paling kuat dibandingkan Kapasitas SDM dan Pemanfaatan TI.

Secara empiris, dominasi SPIP menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan sangat bergantung pada sistem pengendalian yang mampu memastikan keandalan, transparansi, dan akuntabilitas. Meskipun SDM dan TI penting, tanpa pengendalian yang baik, potensi kesalahan dan penyimpangan tetap tinggi. Temuan ini didukung oleh penelitian Mardiana dan Fahlevi (2017) yang menyatakan bahwa pengendalian intern merupakan faktor utama dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa SKPD di Kabupaten Hulu Sungai Utara telah menerapkan unsur SPIP secara cukup baik, sehingga mampu menjadi faktor penentu utama dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Oleh karena itu, penguatan sistem pengendalian intern perlu menjadi prioritas utama dalam peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kesimpulan, Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini membuktikan bahwa kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Secara parsial, ketiga variabel tersebut juga memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Di antara ketiga variabel tersebut, sistem pengendalian intern merupakan faktor yang memiliki pengaruh paling dominan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah memerlukan dukungan sumber daya manusia yang kompeten, pemanfaatan teknologi informasi yang optimal, serta penerapan sistem pengendalian intern yang efektif.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Pertama, penelitian hanya dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Kedua, penelitian hanya menggunakan tiga variabel independen, yaitu kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern, sehingga masih terdapat faktor-faktor lain yang berpotensi memengaruhi kualitas laporan keuangan namun belum dianalisis. Ketiga, data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner sehingga jawaban responden sangat bergantung pada persepsi masing-masing dan berpotensi menimbulkan subjektivitas.

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang ada, Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara diharapkan terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dengan mengembangkan sistem informasi keuangan yang lebih terintegrasi serta meningkatkan kualitas infrastruktur dan kemampuan pengguna, serta memperkuat sistem pengendalian intern melalui peningkatan fungsi pengawasan, evaluasi berkala, dan penerapan prosedur pengendalian yang konsisten agar kualitas laporan keuangan semakin baik. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan memperluas objek penelitian pada pemerintah daerah lain sehingga hasil penelitian memiliki tingkat generalisasi yang lebih tinggi, menambahkan variabel lain seperti komitmen organisasi, budaya organisasi, kompetensi aparatur, sistem akuntansi keuangan daerah, atau tata kelola pemerintahan (*good governance*), serta

menggunakan metode penelitian yang lebih beragam, seperti mixed methods atau analisis longitudinal, untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta seluruh responden yang telah memberikan izin, dukungan, serta informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan instansi, rekan-rekan kerja, dan semua pihak yang telah memberikan bantuan, masukan, serta dukungan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

Referensi

- Andrian, E., & Rahmawati. (2017). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar*. Erlangga.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi sektor publik: Sistem akuntansi sektor publik*. Salemba Empat.
- Fahmi, I. (2013). *Manajemen keuangan perusahaan dan pasar modal*. Mitra Wacana Media.
- Griffin, R. W. (2004). *Manajemen* (Edisi ke-7). Erlangga.
- Harmoni. (2016). Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi*.
- Julita, & Susilatri. (2018). Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*.
- Kadir, A., & Triwahyuni, T. C. (2012). *Pengenalan teknologi informasi*. Andi.
- Mahmudi. (2007). *Manajemen kinerja sektor publik*. UPP STIM YKPN.
- Mardiana, & Fahlevi. (2017). Pengaruh pengendalian intern dan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*.
- Nurlis. (2018). Pengaruh penerapan standar akuntansi dan kompetensi aparatur terhadap kualitas laporan keuangan. *Jurnal Akuntansi*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Rahmadani. (2015). Pengaruh sistem akuntansi dan pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi*.
- Riandani. (2017). Pengaruh kapasitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan. *Jurnal Akuntansi*.
- Ridzal, N. A., Syahdan, S. A., Muis, M., Yamin, N. Y., & Karmila. (2022). Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern

- pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Buton Selatan. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(1).
- Ridzal, M., et al. (2022). Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.
- Roshanti, A., et al. (2014). Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi*.
- Setianingrum, D. (2016). Pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi*.
- Soimah. (2014). Pengaruh pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi*.
- Supriyanto, A. S., & Machfudz, M. (2010). *Metodologi penelitian manajemen*. UIN Maliki Press.
- Tjiptoherijanto, P. (2001). *Sumber daya manusia dalam pembangunan nasional*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Turban, E., McLean, E., & Wetherbe, J. (2005). *Information technology for management*. John Wiley & Sons.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Yosefrinaldi. (2013). Pengaruh kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi*.
- Yuliani, & Agustini. (2016). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan. *Jurnal Akuntansi*.